

Analisis penyelundupan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing untuk memiliki tanah di Indonesia : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 PK/PDT/2011 dan Nomor 178 PK/PDT/2011 = Analysis on fraudulent creation of point of contacts to acquire a property in Indonesia under right to own by foreigner : case study on Supreme Court Decision Number 302 PK/PDT/2011 and Number 178 PK/PDT/2011

Pakerti Wicaksono Sungkono, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20346461&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan industri pariwisata Indonesia menarik minat warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia. Minat ini dibatasi oleh larangan bagi warga negara asing untuk memiliki tanah di Indonesia dengan sertipikat hak milik sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Untuk mengatasi hal ini, kebanyakan dari warga negara asing mengadakan nominee agreement dengan warga negara Indonesia untuk menghindari keberlakuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria tersebut. Penggunaan nominee agreement untuk memiliki tanah dengan sertipikat hak milik ini merupakan bentuk penyelundupan hukum. Berdasarkan 2 kasus yang telah dianalisis, diperoleh kesimpulan bahwa belum ada konsistensi pandangan dan pemahaman hakim terhadap nominee agreement sebagai sarana untuk menyelundupkan hukum.

.....The growth of Indonesia Tourism Industry attracts foreigners to have land in Indonesia. In addition, according to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law, the right to own a land in Indonesia is an exclusive right for Indonesian. On the contrary, most of the foreigners disobey this law by conducting nominee agreement with Indonesian to avoid this Law. The use of nominee agreement to acquire property under right to own is considered as fraudulent creation of point of contacts under Private International Law. This research's result is that there is no such consistency on the judges' understanding concerning nominee agreement as a tool to evade the agrarian law.